



**Hubungan antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan  
Dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan di Provinsi Lampung**

**Relationship Between The Implementation of Community Forest  
Program With The Performance of Forestry Extension Worker In  
Lampung Province**

**Yulistia Elena<sup>1</sup>, Yuniar Aviati<sup>1</sup>, Dewangga Nikmatullah<sup>1</sup> ✉**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Diterima 26 Jul 2021 Direvisi 26 Des 2021 Diterbitkan 29 Des 2021</p>	<p><i>The Community Forest Program (HKm) is one of the schemes of the Social Forestry Program (PS), which is a state forest whose main use is to empower the community. Forestry instructors as the spearhead of the implementation of the HKm Program are expected to have the ability as a companion and can help solve problems related to the implementation of the HKm Program. This study aims to determine how the relationship between the implementation of the HKm Program with the performance of forestry extension worker. The research was carried out at UPTD KPH Pematang Neba and UPTD KPH Batu Serampok in August – October 2020, with respondents consisting of 70 members of the HKm group. . The method used is the survey method. The relationship between the implementation of the HKm program and the performance of the forestry extension worker was analyzed using Spearman's Rank correlation. The results showed that there was a significant relationship of 55.6 percent between the implementation of the Hkm Program and the performance of forestry extension worker.</i></p>
<p>e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628</p> <p>DOI <a href="https://doi.org/10.19184/jkrn.v2i2.25776">https://doi.org/10.19184/jkrn.v2i2.25776</a></p>	
<p><b>Keywords:</b> <i>Community Forest Program, Performance of Forestry Extension Worker</i></p>	

✉ Penulis Koresponden :

E-mail : [dewangganikmatullah@yahoo.com](mailto:dewangganikmatullah@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu skema dari Program Perhutanan Sosial (PS), merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Penyuluh kehutanan sebagai ujung tombak pelaksanaan Program HKm diharapkan mempunyai kemampuan sebagai pendamping dan dapat membantu memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan Program Hkm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan. Penelitian dilaksanakan di UPTD KPH Pematang Neba dan UPTD KPH Batu Serampok pada bulan Agustus – Oktober 2020, dengan responden terdiri dari anggota kelompok HKm berjumlah 70 orang. Metode yang digunakan adalah metode survei. Hubungan antara pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan dianalisis menggunakan korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang nyata sebesar 55,6 persen antara pelaksanaan Program Hkm dengan kinerja penyuluh kehutanan.*

**Keywords:** Program Hutan Kemasyarakatan, Kinerja Penyuluh Kehutanan

© 2021, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ

**PENDAHULUAN**

Hutan berpotensi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Life Supporting System*) termasuk sistem pertanian pangan, dan sebagai penyedia pangan (*Forest for Food Production*). Kegiatan eksplorasi berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan, konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan (misalnya perkebunan, transmigrasi, jalan raya), *timber ekstraksion*, *illegal logging* dan kebakaran hutan, penegakan hukum yang lemah dan inefisiensi peraturan dalam proses pengusahaan hutan, semua itu menyebabkan sumberdaya hutan dalam kondisi rusak. Tekanan terhadap sumber daya hutan bertambah dengan masuknya masyarakat ke dalam hutan untuk tinggal dan mengelola kawasan hutan.

Provinsi Lampung memiliki luas kawasan hutan sekitar 1.004.735 hektar (28,45 persen) dari luas Provinsi Lampung dan lebih dari 53,34 persen dalam kondisi rusak berdasarkan kondisi penutupan lahannya (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2017). Penyebab utama kerusakan kawasan hutan tersebut disebabkan adanya perambahan hutan sebagai dampak negatif dari peningkatan penduduk yang memicu peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman sehingga mengakibatkan pembangunan pemukiman dan lahan garapan illegal di kawasan hutan negara.

Tingginya tingkat kerusakan hutan memerlukan percepatan dalam perbaikan. Pilihan yang ditempuh adalah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya rehabilitasi hutan, dengan harapan dapat mengurangi anggaran negara dan terjadi percepatan rehabilitasi hutan. Pola pengelolaan hutan ini tertuang dalam Program Perhutanan Sosial yang merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial, budaya dalam bentuk salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Peran penyuluh dalam upaya mendukung perhutanan sosial tertuang dalam

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.

Penyuluh memegang peran penting dalam pelaksanaan HKm. Penyuluhan bukan merupakan suatu kegiatan yang hanya berhenti sampai pada tahap penjelasan, namun penyuluhan memiliki peran penting bagi pihak sasaran agar dapat melanjutkan penjelasan itu dalam bentuk kegiatan yang nyata (Samsudin, 1982). Menurut Mardikanto (1993), penyuluh harus dapat mengidentifikasi kebutuhan sasaran, memberikan petunjuk tentang kebutuhan sasaran yang harus dipenuhinya, dan membimbing sasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut agar sasaran penyuluhan dapat memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan penyuluhan.

Melalui kebutuhan tersebut, masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan/tugasnya. Kinerja penyuluh menunjukkan pertanggungjawaban penyuluh terhadap kegiatan/tugas yang menjadi kewajibannya sebagai penyuluh. Kinerja penyuluh dapat dinilai berdasarkan kemampuan masing-masing penyuluh dalam melaksanakan kegiatan/tugas yang telah ditentukan (Bahua *et al.*, 2010).

Penilaian terhadap kinerja penyuluh akan menunjukkan bagaimana tingkat kinerja penyuluh selama ditugaskan sebagai penyuluh. Tingkat kinerja penyuluh yang terlihat dari hasil kerja dalam pelaksanaan kegiatan/tugasnya dapat berbeda-beda tergantung dari masing-masing penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kinerja penyuluh kehutanan yang baik diharapkan akan mendukung program pemerintah. Salah satunya Program Hutan Kemasyarakatan sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, namun tidak terlepas dari bantuan penyuluh kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan dengan kinerja penyuluh kehutanan.

## **METODE PENELITIAN**

Program HKm dilaksanakan di 9 (sembilan) UPTD KPH dari 17 UPTD KPH yang ada. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau *purposive* yaitu dengan memilih UPTD KPH Pematang Neba dan UPTD KPH Batu Serampok. Responden penelitian diambil dari 4 (empat) kelompok HKm di 2 (dua) UPTD KPH tersebut, menggunakan salah satu metode *probability sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 70 orang responden. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2020, menggunakan metode survei. Hubungan antara pelaksanaan Program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan (X)**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan ini dijadikan tempat pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat

lokal untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat (Soemarwoto, 2000). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan sebagai pengembangan kapasitas dan pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan menyelesaikan persoalan sosial. Program HKm dilaksanakan dengan memberdayakan petani dalam wadah kelompok tani hutan untuk memanfaatkan potensi alam yang telah tersedia. Potensi sumberdaya wilayah yang dimanfaatkan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup petani, baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan. Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan ini juga mengurangi jumlah pengangguran dan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan dengan menitikberatkan pada manajemen hutan yang dibantu oleh penyuluh. Penelitian pelaksanaan Program HKm ini dilihat dari tiga indikator, yaitu aspek teknis dan ekologis, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan.

### **Aspek Teknis dan Ekologis**

Aspek teknis dan ekologis pelaksanaan Program HKm merupakan bentuk pemberdayaan petani dan pemanfaatan kawasan hutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap aspek teknis dan ekologis pelaksanaan Program HKm dalam kategori baik. Penyuluh kehutanan memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai teknik usahatani berupa pola tanam dan kombinasi tanaman pada areal HKm. Penyuluh juga melakukan penyuluhan dan pembinaan mengenai teknik konservasi hutan seperti rencana pengelolaan dan teknik konservasi areal HKm.

Pelaksanaan program HKm pada aspek ekologis berupa penyuluhan dan pembinaan mengenai pemeliharaan dan perbanyak tanaman hutan. Jenis tanaman yang dikembangkan dalam HKm berbeda-beda sesuai dengan kondisi biofisiknya dan sistem penanaman yang dikembangkan adalah multi strata tajuk. Sistem multi strata tajuk tersebut memiliki dua fungsi yakni fungsi lindung terhadap tanah dan fungsi ekonomi dengan memberikan pendapatan bagi petani secara berkelanjutan. Terkait dengan pemeliharaan, ada sebagian petani yang menggunakan pupuk untuk kegiatan usahatannya, dan sebagian yang lain hanya mengandalkan kesuburan tanah dan lingkungan dalam menanam jenis tanaman tertentu.

### **Aspek Ekonomi**

Pemberdayaan masyarakat dalam Program HKm, tidak hanya melibatkan namun merupakan proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya hutan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Program HKm diharapkan bisa memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ekonomi rumah tangga petani hutan. Hasil penelitian bahwa responden menilai aspek ekonomi pelaksanaan program HKm dalam kategori baik. Responden cukup merasakan memperoleh manfaat ekonomi dengan adanya program HKm.

Penyuluh kehutanan, selain memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai kegiatan budidaya tanaman hutan, juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani HKm mengenai potensi ekonomi dan pemanfaatan kawasan hutan. Sebagian petani juga mengaku mendapatkan penyuluhan mengenai

pemanfaatan dan pemungutan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), pemanfaatan jasa aliran air, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Materi penyuluhan dan pembinaan yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan petani dalam mengaplikasikan materi penyuluhan sehingga masing-masing kelompok tani hutan mendapatkan materi penyuluhan dan pembinaan yang tidak sama.

### **Aspek Kelembagaan**

Pengelolaan HKm dilakukan secara perorangan pada lahan garapan milik masing-masing anggota kelompok. Keputusan teknis pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan bergantung pada kesepakatan kelompok. Hasil penelitian yaitu penilaian responden terhadap aspek kelembagaan pelaksanaan program HKm dalam kategori baik.

Kelembagaan kelompok di empat kelompok penelitian telah tersusun yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, namun sebagian kelompok tani belum rutin menyusun program kerja kelompok, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani juga belum tercatat dengan baik. Sistem pembagian tugas dalam kelompok tani baru sebagian yang dilakukan dengan baik, masih dominan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada beberapa orang saja. Pengelolaan kelembagaan kelompok tani dibantu oleh penyuluh kehutanan sejak pertama pembentukan hingga saat ini.

### **Kinerja Penyuluh Kehutanan (Y)**

Kinerja penyuluh merupakan respon atau perilaku individu terhadap keberhasilan kerja yang dicapai oleh individu secara aktual dalam suatu organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan periode waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja penyuluh kehutanan merupakan sekumpulan dari penilaian tingkat kinerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan. Kinerja penyuluh kehutanan pada penelitian ini mengacu kepada dua indikator yaitu tugas pokok penyuluh kehutanan dan perilaku kerja.

### **Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan**

Tugas pokok penyuluh kehutanan merupakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan penyuluhan kehutanan. Tugas pokok penyuluh kehutanan terdiri dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan penyuluhan kehutanan. Berdasarkan hasil penilaian responden kinerja penyuluh kehutanan pada indikator tugas pokok berada pada klasifikasi baik. Klasifikasi baik menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas pokoknya sudah baik, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan penyuluhan kehutanan.

Persiapan penyuluhan kehutanan meliputi penyusunan program penyuluhan, penyusunan RKT perorangan dan penyusunan kebutuhan materi, metode, serta informasi penyuluhan kehutanan. Selain itu, menurut (Suhanda *et al.*, (2008), perencanaan yang termasuk dalam persiapan penyuluhan menempati skor tinggi dalam penilaian kinerja penyuluh. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan meliputi penyampaian materi penyuluhan, penerapan metode penyuluhan, pengorganisasian sasaran penyuluhan dan pengembangan jejaring kerja obyek penyuluhan kehutanan. Menurut Yanfika *et al.*, (2020), menyatakan efektivitas penyuluhan yang masih rendah disebabkan oleh metode penyuluhan yang terbatas

pada metode ceramah, oleh karena itu penting untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan metode yang bervariasi sesuai kebutuhan sasaran dan dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha.

### **Perilaku Kerja Penyuluh Kehutanan**

Perilaku kerja penyuluh kehutanan merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh penyuluh dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka bekerja. Perilaku kerja terdiri dari orientasi pelayanan, komitmen melaksanakan tugas dengan baik, inisiatif kerja, dan kerja sama pelaksanaan penyuluhan. Orientasi pelayanan merupakan sikap yang ditunjukkan oleh penyuluh dalam berinteraksi dengan petani, antara lain sikap sopan dan ramah dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan. Sebagian besar responden juga menilai penyuluh cukup memuaskan dan responsif dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan, serta menyampaikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya.

Penyuluh memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas. Penyuluh merupakan sosok yang bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh selama melaksanakan penyuluhan dan pembinaan. Penyuluh memiliki inisiatif kerja dan sering menyampaikan ide-ide terkait penyuluhan dan pembinaan kelompok HKm, selain itu bisa bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

### **Hubungan antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan**

Kinerja penyuluh kehutanan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu program. Penyuluh kehutanan dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja yang baik dalam mengawal program-program pembangunan, termasuk pembangunan kehutanan. Hubungan antara pelaksanaan Program HKm (X) dengan kinerja penyuluh kehutanan (Y) dianalisis menggunakan korelasi Rank Spearman. Berikut hasil pengolahan dan perhitungan data dengan menggunakan program SPSS.

**Tabel 1.** Hasil Analisis Hubungan Pelaksanaan Program HKm dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan

			<b>Pelaksanaan HKm</b>	<b>Kinerja PPL</b>
Spearman's rho	Pelaksanaan HKm	Correlation Coefficient	1,000	,556**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	70	70
	Kinerja PPL	Correlation Coefficient	,556**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	70	70

Keterangan :

\*\* : berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 99% ( $\alpha = 0,01$ )

\* : berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ )

tn : tidak nyata pada taraf kepercayaan 95% dan 99%

Tabel 1 menunjukkan bahwa hubungan pelaksanaan program HKm dengan kinerja penyuluh kehutanan adalah 0,556 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program HKm dengan kinerja

penyuluh kehutanan memiliki hubungan yang signifikan positif dan memiliki interpretasi bahwa kinerja penyuluh kehutanan ditentukan oleh pelaksanaan program hutan kemasyarakatan sebesar 55,6 persen sisanya 54,4 persen ditentukan oleh variabel lain. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,556 memiliki arti hubungan yang kuat. Hal ini berarti, apabila kinerja penyuluh kehutanan baik maka program pemanfaatan HKM akan berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan serta sasaran dari program tersebut. Perubahan kinerja penyuluh akan diikuti secara positif oleh tingkat pelaksanaan program HKM oleh petani.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra *et al.*, (2018), Kinerja penyuluh pertanian lapangan sangat penting dalam pengembangan subsistem produksi. Kinerja penyuluh berhubungan sangat nyata dengan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung spesifik lokasi. Namun kekuatan hubungan kedua variabel dalam penelitian ini termasuk kategori rendah. Penyebab rendahnya kekuatan hubungan tersebut adalah petani tidak sesuai menerapkan teknologi budidaya jagung spesifik lokasi yang dianjurkan oleh penyuluh.

Penyuluh kehutanan harus bisa menempatkan anggota kelompok sebagai rekan kerja dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok HKM. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan yang paling penting dari tugas seorang penyuluhan adalah mengubah sikap mental yang mendasari tingkah laku para petani menjadi lebih baik. Sikap mental ini jika telah terwujud maka akan mudah bagi penyuluh dan petani dalam melaksanakan program-program pembangunan termasuk kehutanan. Hal ini didukung oleh Nurmayasari *et al.*, (2020), yang menyebutkan bahwa kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh pertanian dan ini akan berdampak pada keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian bahwa hubungan pelaksanaan Program HKM dengan kinerja penyuluh kehutanan adalah 0,556 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program HKM dengan kinerja penyuluh kehutanan memiliki hubungan yang signifikan positif dan memiliki interpretasi bahwa kinerja penyuluh kehutanan ditentukan oleh pelaksanaan Program HKM sebesar 55,6 persen dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program HKM dengan kinerja penyuluh kehutanan memiliki hubungan yang signifikan positif. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,556 memiliki arti hubungan yang kuat. Hal ini berarti, apabila kinerja penyuluh kehutanan baik maka Program HKM akan berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan serta sasaran dari program tersebut. Perubahan kinerja penyuluh akan diikuti secara positif oleh tingkat pelaksanaan Program HKM oleh anggota kelompok HKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahua, M. I., Jahi, A., Asngari, P. S., Saleh, A., & Purnaba, I, G, P. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo*. Institut Pertanian Bogor.
- Chandra, H., Muani, A., & Komariyati. (2018). *Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Pengembangan Agribisnis Jagung Spesifikasi Lokasi di Kabupaten Kubu*

- Raya. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 7(1), 30–40.
- Mardikanto. (1993). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurmayasari, I., Mutholib, A., Damayanti, N, A, L., & Safitri, Y. (2020). Kesetaraan Gender pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. *Journal of Extension and Development*, 1(2), 81–89.
- Samsudin. (1982). *Pengantar Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Hapsara Press.
- Soemarwoto. (2000). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhanda, N. ., Jahi, A., Sugeng, B. ., & Susanto, D. (2008). Kinerja Penyuluh Pertanian di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2), 100–108.
- Yanfika, H., Amanah, S., Fatchiya, A., Asngari, P, S., Mutolib, A., & Rangga, K. . (2020). The Influence Of Extension Activities on The Competencies of Traditional Fisheries Processing In Lampung Province. *JPHPI*, 23(1), 22–30.